

VOL. 11 NOVEMBER 2020



ETIKA

DEWANPERS

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

SELENGGARAKAN
PCR TEST V
BAGI PEKERJA MEDIA

**UKW MULAI
BERGERAK
LAGI....**

**FELLOWSHIP
JURNALISME**
PERUBAHAN PERILAKU



**MENDATA MEDIA DI
SELA-SELA KECAMUK
PANDEMI COVID-19**

MENDATA MEDIA DI SELA-SELA KECAMUK PANDEMI COVID-19

Oleh: AHMAD DJAUHAR

Anggota Dewan Pers.
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan &
Ratifikasi Pers Dewan Pers



Hingga akhir November 2020, jumlah seluruh perusahaan pers (media) yang terverifikasi Dewan Pers, mencapai 260 unit, 219 di antaranya berstatus terverifikasi lengkap, baik yang secara administratif maupun secara faktual.

Pada awal tahun, target yang dipatok untuk verifikasi faktual adalah 114 perusahaan. Ketika pada pertengahan Maret tiba diumumkan status *lockdown* sehubungan dengan merebaknya pandemi Covid-19. Pemerintah pusat pun menghentikan seluruh kegiatan termasuk tugas/kewajiban di Dewan Pers sebagai lembaga kuasi negara itu. Sempat muncul sedikit keraguan apakah target pencapaian faktualisasi verifikasi tersebut tercapai, mengingat kondisi *covid-cavid* itu sedikit banyak pasti memengaruhi kelancaran jalannya program tersebut.

Namun berkat kegigihan seluruh anggota beserta dukungan sekretariat Dewan Pers, target tersebut dapat dicapai sebelum pengujung tahun. Ketika artikel ini ditulis, masih terdapat sejumlah kegiatan fisik yang dilakukan anggota Dewan Pers untuk terjun langsung ke berbagai daerah, sehingga hal tersebut sedikit-banyak membantu penambahan angka yang sudah di atas target tersebut.

Ditinjau dari pencapaian hingga 2019 yang secara akumulatif—sejak program verifikasi ini dilaksanakan—mencapai 1.109 perusahaan pers, hasil verifikasi secara keseluruhan



hingga akhir November 2020 mencapai 1.461 perusahaan pers. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel.

Selain itu, masih terdapat daftar antrian cukup panjang dari sejumlah perusahaan pers di negeri ini, yang menginginkan untuk dapat diverifikasi Dewan Pers. Artinya, kesadaran perusahaan pers untuk meratifikasi ketentuan yang sudah disepakati oleh komunitas pers nasional—yang diamankan melalui Dewan Pers—sudah makin kuat.

Karena, dengan terverifikasinya perusahaan pers itu, institusi media tersebut selain mematuhi ketentuan perundangan dan menegakkan Kode Etik Jurnalistik, perusahaan pers tersebut juga membayar pajak kepada negara dan memberikan perlindungan secara komprehensif kepada wartawan/karyawan pers sesuai ketentuan perundangan. Karenanya, media tersebut dengan sendirinya terlindungi oleh UU No. 40/1999 tentang Pers.

Hal ini sesuai dengan tekad yang sudah ditorehkan oleh komunitas pers nasional dalam Piagam Palembang pada 2010. Mereka sepakat membuat ketentuan untuk membedakan mana media pers yang serius dan mana media yang dibuat asal-asalan. Karena, hal itu berkaitan dengan profesionalisme dan perlindungan hukum bagi institusi maupun jurnalis yang bekerja untuk institusi media yang bersangkutan.

**DATA VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS
JANUARI SAMPAI DENGAN AKHIR NOVEMBER 2020**

Jenis Media	Terverifikasi Faktual	Terverifikasi Administratif
Cetak	31	69
Siber	85	169
Radio	0	2
Televisi	3	3
Jumlah	119	233

PERUSAHAAN PERS PROFESIONAL

Bagi Dewan Pers sendiri, tugas mendata perusahaan pers ini selain merupakan amanat UU Pers juga sekaligus untuk membina institusi media yang serius ingin menerapkan aturan dan ketentuan yang berlaku apabila ingin menjadi perusahaan pers profesional.

Dengan makin banyak perusahaan pers dan insan media yang profesional, maka kemungkinan munculnya misinformasi, penyesatan informasi, maupun penyebaran *hoax* dapat diminimalkan. Karena, berbagai hal negatif tersebut tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat seiring dengan maraknya penggunaan media social, sementara di sisi lain kian menipis pula peran media pengusung jurnalisme yang terbukti mampu menjaga kondusivitas masyarakat di berbagai belahan di dunia, selama berabad-abad.

Karena itu, kendati terjadi peristiwa pandemi yang berimplikasi pada penghentian banyak kegiatan, Dewan Pers memandang program pendataan media melalui sistem verifikasi terhadap perusahaan pers ini harus tetap dilaksanakan.

Memang tidak sedikit kendala yang mengganjal kelancaran program pendataan ini, termasuk ketidaksiapan perusahaan pers untuk diverifikasi, misalnya, padahal tim verifikator sudah sampai di kota di mana media berlokasi. Hal seperti ini tidak hanya sekali dua terjadi, namun relatif sering. Padahal komunikasi intensif telah dilakukan sebelumnya.

Persoalan akomodasi dan logistik yang dihadapi tim verifikator tak jarang 'mengganggu' kelancaran program verifikasi ini, karena anggaran 'bantuan APBN' bagi Dewan Pers memang tidak terlalu besar, bahkan relatif kecil. Ini sudah menjadi rahasia umum sehingga sejumlah calon *verificant* yang ingin segera diverifikasi mencoba menawarkan diri untuk memfasilitasi tim verifikator Dewan Pers agar datang ke daerah/kota domisili mereka.

Hal prinsip yang harus dipegang teguh oleh siapapun

yang melaksanakan verifikasi faktual adalah sedapat mungkin untuk menghindari penyediaan fasilitas yang disediakan oleh *verificant* (institusi media yang diverifikasi). Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari potensi timbulnya *moral hazard* yang terjadi di kemudian hari.

Misalnya, ABC, nama seorang anggota Dewan Pers atau Tenaga Ahli di satu Komisi Dewan Pers menjadi verifikator (melaksanakan verifikasi faktual) terhadap media XYZ, dan dalam pelaksanaan di lapangan difasilitasi—akomodasi atau sekadar makan siang/makan malam—oleh *verificant*, sangat mungkin hanya dalam hitungan hari setelah kepulangan anggota/tenaga ahli Dewan Pers itu ke Jakarta, awak dari media XYZ tadi sudah menanyakan berulang-ulang tentang bagaimana hasil verifikasi faktual terhadap media mereka. Mau tidak mau, hal ini tentu akan memengaruhi kondisi psikologis sang verifikator, minimal untuk menjawab lolos-tidaknya si media XYZ tadi sebagai perusahaan pers berstatus terverifikasi Dewan Pers.

Karena itu, langkah paling bijak adalah menolak segala bentuk fasilitasi yang disediakan oleh *verificant* untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya perasaan tidak enak dan/atau *moral hazard* tersebut, karena terdapat kemungkinan bahwa perusahaan pers tersebut—karena satu dan lain hal—sebenarnya tidak menyandang status sebagai perusahaan terverifikasi Dewan Pers. Karena, pada dasarnya, si *verificant* tersebut belum benar-benar meratifikasi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Standar Perusahaan Pers seperti diamanatkan dalam SK No. 04/Peraturan-DP/III/2008 jo SK No. 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.

VERIFIKASI FAKTUAL ONLINE

Karena masih dalam kondisi pandemi Covid 19 dan adanya kebijakan PSBB, pendataan berupa verifikasi faktual dengan melihat langsung kantor redaksi perusahaan pers tidak bisa dilakukan secara optimal, dan sempat terhenti selama beberapa bulan. April tahun ini, Komisi Pendataan mengajukan *draft* Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perusahaan Pers secara daring atau melalui *video conference*, yang sudah dibahas bersama dengan konstituen Dewan Pers pada 20 Mei 2020 dan *draft* tersebut disetujui Rapat Pleno Dewan Pers pada Mei.

Pada 24 Juni 2020, Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VI/2020 tentang Pedoman Verifikasi Faktual Perusahaan Pers Secara Virtual. Uji coba pelaksanaan Verifikasi Faktual secara daring pun sudah terselenggara beberapa kali. Selanjutnya, pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan secara langsung maupun virtual.



Bagi Dewan Pers sendiri, tugas mendata perusahaan pers ini selain merupakan amanat UU Pers juga sekaligus untuk membina institusi media yang serius ingin menerapkan aturan dan ketentuan yang berlaku apabila ingin menjadi perusahaan pers profesional.

Toh begitu, pelaksanaan verifikasi faktual secara daring alias virtual ini hingga akhir November belum banyak terlaksana, mengingat pelibatan konstituen Dewan Pers sebagai saksi di lapangan masih memerlukan penjabaran teknis dan membutuhkan waktu untuk sosialisasi yang intens.

“Jangankan secara virtual, verifikasi faktual secara fisik yang didatangi tim Dewan Pers saja relatif mudah diakali oleh *verificant*. Misalnya, pernah ada yang mengaku bangunan tertentu itu sebagai kantor redaksi mereka. Begitu tikm verifikator beranjak dari ‘kantor media’ itu, mereka copoti berbagai atribut meia tersebut dan nampaklah wajah asli bangunan itu yang sebenarnya adalah kantor sebuah cabang organisasi kepemudaan,” ujar seorang saksi yang sempat mengikuti proses verifikasi faktual di wilayah Kepulauan Riau suatu ketika. ●

Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan; **Pengurus Dewan Pers 2019-2022: Ketua:** Mohammad NUH, **Wakil Ketua:** Hendry Chaerudin Bangun, **Anggota:** Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudiby, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya. **Kepala Sekretariat:** Syaefudin, **Berita Dewan Pers ETIKA: Pemimpin Redaksi / Penanggung Jawab:** Mohammad NUH, **Wakil Pemimpin Redaksi:** Asep Setiawan, **Tim Redaksi:** Herutjahjo, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Bunga Tiara, Fadli, Iwhan Sudarwanto BR, **Alamat Redaksi:** Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110, **Berita Dewan Pers ETIKA: Tel:** (021) 3521488, 3504877, 3504874-75; **Faks:** (021) 3452030; **Email:** sekretariat@dewanpers.or.id; **Twitter:** dewanpers; **IG:** @officialdewanpers; **Facebook:** Dewan Pers; **YouTube:** Dewan Pers; **Web:** dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

UKW MULAI BERGERAK LAGI....

Oleh: JAMALUL INSAN

Anggota Dewan Pers.
Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan &
Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers



Kegiatan uji kompetensi jurnalis (UKJ) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) bulan Maret di Padang ini menjadi kegiatan uji kompetensi wartawan terakhir saat datangnya pandemi di negeri kita. Semula, kegiatan yang difasilitasi Dewan Pers ini direncanakan akan melibatkan 400 wartawan di 20 Kota di Indonesia. Namun hadirnya covid 19 memaksa semua kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka itu harus dihentikan.

Keputusan ini memang dirasakan sangat berat oleh lembaga penyelenggara UKW/UKJ, karena di saat bersamaan antusiasme jurnalis untuk ikut UKW sangat besar. Ini terbukti saat kegiatan UKW tatap muka dihentikan karena alasan protokol kesehatan dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pelbagai daerah di Indonesia, sejumlah wartawan “kecele” dengan tawaran untuk ikut dalam UKW online. Padahal sampai hari ini, kegiatan UKW berbasis komputer/internet alias UKW daring masih belum disepakati pelaksanaannya oleh konsituen Dewan Pers.

Jauh sebelum datangnya pandemi, sebenarnya Dewan Pers sudah memikirkan kemungkinan penyelenggaraan uji kompetensi wartawan berbasis komputer/internet, sebagai respons terhadap perkembangan teknologi. Bahkan saat pandemi ini, komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Profesi Dewan Pers telah menggelar rangkaian diskusi sebanyak 5 kali membahas UKW Berbasis komputer/internet. Tiga organisasi profesi PWI, AJI dan IJTI sudah menyampaikan materinya dengan segala catatannya. Tiga lembaga UKW lain yang mewakili lembaga peraguruan tinggi



REKAP: DATA PELAKSANAAN UKW 2019 DAN 2020

PENYELENGGARAAN UKW TAHUN 2019

NO	NAMA LEMBAGA UKW	JUMLAH PENYELENGGARA UKW	MUDA	MADYA	UTAMA	TOTAL PESERTA KOMPETEN	BELUM KOMPETEN	TOTAL SELURUH PENDAFTAR
1	PWI	67	1066	101	35	1202		1202
2	AJI	6	65	19	26	110		110
3	IJTI	9	129	1	0	130	5	135
4	LPDS	9	148	15	9	172		172
5	UPN Yogja	4	52	2	0	54	4	58
6	LSPR	3	43	4	1	48	0	48
7	LKBN ANTARA	1	13	1	3	17		17
8	Dewan Pers	1	0	0	4	4		4
9	Kompas	1	15	0	0	15		15
	Grand Total	101	1531	143	78	1752	9	1761

PENYELENGGARAAN UKW UKW JANUARI TAHUN 2020

NO	NAMA LEMBAGA UKW	JUMLAH PENYELENGGARA UKW	MUDA	MADYA	UTAMA	TOTAL PESERTA KOMPETEN	BELUM KOMPETEN	TOTAL SELURUH PENDAFTAR
1	PWI	23	410	71	18	499		499
2	AJI	4	65	9	23	97		97
3	IJTI	5	82	1	0	83	1	84
4	LPDS	1	10	0	0	10		10
5	UPN Yogja	2	21	0	0	21	9	30
6	LSPR	1	5	0	0	5		5
7	LKBN ANTARA	1	18	6	6	30		30
8	Tempo	1	0	5	10	15		15
9	Univ. Moestopo	1	12	0	1	13		13
	Grand Total	39	623	92	58	773	10	783



menyampaikan pemaparannya yakni universitas Mustopo dan LSPR, serta lembaga UKW LPDS. Namun keputusan penyelenggaraan UKW mode daring ini masih memerlukan kesepakatan terhadap beberapa catatan yang disampaikan para pemateri.

Tampaknya untuk menjawab besarnya antusiasme para wartawan mengikuti uji kompetensi ini pelbagai upaya dan terobosan penyelenggaraan UKW harus dilakukan. Seperti saat kita dilanda pandemi ini, jumlah peserta UKW tahun 2020 ini turun drastis. Bila pada tahun 2019 total peserta UKW sebanyak 1752 wartawan. Namun pada akibat pandemi, hingga bukan November jumlah peserta UKW hanya 783, atau hanya sekitar 44,7% dibanding tahun 2019. ●

LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2020

TAHUN 2020:

TOTAL KASUS: 415
SELESAI: 365 (88%)
DALAM PROSES: 50 (12%)



Januari

- Total 41 kasus
- Selesai 39 kasus (37 surat/mediasi; 1 Kom Hkm; 1 arsip)
- Dalam proses 2 kasus

Februari

- Total 39 Kasus
- Selesai 39 (38 mediasi/surat; 1 arsip)
- Dalam proses 0 kasus

Maret

- Total 34 kasus
- Selesai 34 (mediasi/surat)
- Dalam proses 0 kasus

April

- Total 30 kasus
- Selesai 30 (mediasi/surat)
- Dalam proses 0 kasus

Mei

- Total 28 kasus
- Selesai 28 (22 mediasi/surat; 6 Kom Hkm)
- Dalam proses 0 kasus

Juni

- Total 70 kasus
- Selesai 69 (66 mediasi/surat; 2 Kom Hkm, 1 Kom pdataan)
- Dalam proses 1 kasus

Juli

- Total 56 kasus
- Selesai 55 (52 mediasi/surat; 1 Kom Hkm, 2 arsip)
- Dalam proses 1 kasus

Agustus

- Total 37 kasus
- Selesai 32 (32 mediasi/surat)
- Dalam proses 5 kasus

September

- Total 24 kasus
- Selesai 21 (19 mediasi/surat; 1 Kom Hkm, 1 arsip)
- Dalam proses 3 kasus

Oktober

- Total 56 kasus
- Selesai 18 (17 mediasi/surat; 1 Kom Pdataan)
- Dalam proses 38 kasus

November

- Total 58 kasus
- Selesai 21
- Dalam proses 37 kasus

FELLOWSHIP JURNALISME PERUBAHAN PERILAKU

Oleh: **SHANTI RUWYASTUTI**
Tenaga Ahli



Pandemi Corona menyebabkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, mengalami resesi ekonomi. Dampak pandemi menguntungkan sebagian kecil pelaku usaha seperti yang bergerak di bidang telekomunikasi dan aplikasi daring, namun merugikan sebagian besar bisnis yang lain termasuk perusahaan-perusahaan media. Beberapa perusahaan media terpaksa memberhentikan ratusan jurnalis atau bahkan menyatakan diri bangkrut karena pemasukan iklan menurun sampai dengan 40 persen atau sama sekali tidak ada pendapatan dari iklan. Melihat fenomena ini, Dewan Pers bekerjasama dengan Satgas COVID-19 meluncurkan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang berlangsung antara Oktober sampai dengan Desember 2020. Target utama fellowship adalah para jurnalis yang terkena PHK dan pemotongan gaji serta memenuhi persyaratan seperti lulus uji kompetensi wartawan dan perusahaan yang mensponsorinya lolos verifikasi perusahaan media oleh Dewan Pers.

Pada bulan September 2020, ada 7.000 jurnalis dari 34 provinsi yang mendaftar melalui aplikasi fellowship ini, namun hanya 5.000 orang editor dan reporter yang lolos perekrutan. Di dalam program beasiswa ini, jurnalis dituntut menjadi agen perubahan perilaku dengan mengedukasi publik dalam menghadapi bencana nasional. Wartawan diharapkan menulis berita dengan perspektif perubahan perilaku untuk mencegah penularan COVID-19. Para wartawan memperkaya konten berita yang menekankan perilaku disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Di dalam pertemuan daring dengan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Ketua PWI Atal Depari dan Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo melaporkan status terkini dari Fellowship Jur-



nalisme Perubahan Perilaku yang sudah berlangsung hampir tiga bulan. Pada bulan Oktober 2020 tercatat sebanyak 42.105 artikel yang diserahkan dan dipublikasikan di media peserta. Pada bulan November 2020 ada 68.028 artikel dan sampai dengan 13 Desember 2020, ada 17.549 artikel yang masuk dan terbit di media partisipan. Dengan demikian, ada total 127.640 item berita yang masuk dan terbagi ke dalam kategori media cetak 35.964 berita, media siber 58.574 berita, televisi 29.914 berita, radio 3.158 berita dan media ubahlaku 61 berita.

Ketua Umum PWI Atal Depari menyambut baik Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini karena bukan hanya membantu jurnalis dalam kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Corona, namun juga menempatkan wartawan di garda depan dalam mendiseminasi informasi tentang protokol kesehatan 3M: memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, meskipun vaksin COVID-19 akan diberikan secara bertahap mulai tahun 2021. Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengutip Charles Darwin bahwa penyintas itu bukanlah yang paling kuat atau paling pintar namun yang paling responsif terhadap perubahan. Dalam hal ini, jurnalis menjadi agen perubahan perilaku saat menghadapi

**KETUA SATGAS COVID-19
DONI MONARDO**

Beberapa perusahaan media terpaksa memberhentikan ratusan jurnalis atau bahkan menyatakan diri bangkrut karena pemasukan iklan menurun sampai dengan 40 persen atau sama sekali tidak ada pendapatan dari iklan.

bencana nasional ini. Baik Ketua Umum PWI maupun Ketua Dewan Pers mengharapkan fellowship yang akan berakhir pada Desember 2020 agar diperpanjang tiga bulan ke depan atau bahkan satu semester pada tahun 2021.

Ketua BNPB sekaligus Satgas COVID-19 Doni Monardo berterima kasih kepada para jurnalis peserta fellowship karena merasa sangat terbantu dalam mengklarifikasi berita tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 serta memerangi hoax seputar pandemi Corona melalui staf Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Hery Trianto. Doni berharap fellowship ini bisa dilanjutkan pada tahun 2021 dan akan membawa usulan ini ke dalam rapat-rapat terbatas dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Di dalam arahan dan pembekalan untuk para peserta fellowship, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan agar gaya hidup bersih dan sehat yang selama 9 bulan terakhir ini digaungkan untuk mencegah terpapar dari virus Corona bisa menjadi sebuah budaya ke depannya. Wapres juga meminta bantuan agar media sosial mendukung program vaksinasi melalui tagar vaksin untuk negeri. Akhirnya, Profesor Ma'ruf juga mendukung dilanjutkannya Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku pada tahun 2021. ●

SELENGGARAKAN PCR TEST V BAGI PEKERJA MEDIA, DEWAN PERS GANDENG FIFGROUP, DJARUM FOUNDATION, DAN RUMAH SAKIT PUSAT PERTAMINA (RSPP)

Jakarta, 11 November 2020 – Bekerjasama FIFGROUP dan Djarum Foundation, Dewan Pers kembali melaksanakan tes usap *Polymerase Chain Reaction* (PCR) gratis untuk 135 pekerja media. Seperti sebelumnya, pelaksanaan PCR test kali ini juga melibatkan tim medis dari Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) dan dilaksanakan di Hall Gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.



REGISTRASI PENDAFTARAN
UNTUK SWAB PCR DI HALL
DEWAN PERS





Tentang kegiatan PCR Test untuk pekerja media tersebut, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudiyo, mengatakan, “Di dalam situasi pandemi saat ini, tuntutan bagi profesi wartawan semakin terasa seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat dan bermanfaat. Dengan demikian wartawan, khususnya mereka yang melakukan tugas peliputan di lapangan, saat ini juga menjadi salah satu jenis pekerjaan yang risiko terpapar COVID-19 paling tinggi.”

“Untuk itu Dewan Pers sangat mengapresiasi kepedulian Djarum Foundation, FIFGROUP, dan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tes swab PCR untuk insan media kelima ini. Semoga ke depannya ada lebih banyak perusahaan yang tergerak untuk mendukung kegiatan semacam ini,” ujar Agus.

Dalam kesempatan yang sama, CEO FIFGROUP Margono Tanuwijaya, menyatakan dukungannya ter-

“Untuk itu Dewan Pers sangat mengapresiasi kepedulian Djarum Foundation, FIFGROUP, dan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tes swab PCR untuk insan media kelima ini. Semoga ke depannya ada lebih banyak perusahaan yang tergerak untuk mendukung kegiatan semacam ini,”



PELAKSANAAN TES USAP POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) GRATIS UNTUK 135 PEKERJA MEDIA BERTEMPAT DI HALL DEWAN PERS, 11 NOVEMBER 2020

hadap program PCR test gratis yang diprakarsai oleh Dewan Pers dan lembaga terkait lainnya, “Sebagai salah satu stakeholders, FIFGROUP mendukung penuh agar rekan-rekan media dapat bekerja dengan tenang dan tetap produktif di masa pandemi ini.”

Margono menambahkan, “FIFGROUP juga bersyukur telah berperan serta membantu meringankan beban masyarakat sejak pandemi dengan memberikan lebih dari 76.000 paket sembako di 620 titik se-Indonesia, serta bantuan 8 ventilator di 6 propinsi dan alat pelindung diri (APD). Semoga kehadiran FIFGROUP bisa turut meringankan beban masyarakat di dalam masa pandemi ini.”



Senada dengan Margono, *Corporate Communication Manager* Djarum Foundation Budi Darmawan mengatakan, “Keterlibatan Djarum Foundation dalam kegiatan uji usap untuk pekerja media adalah kelanjutan dari program yang telah berjalan sejak Maret 2020, di mana kami juga telah ikut bergotong-royong membantu penanganan COVID-19 di berbagai daerah dengan menyalurkan alat kesehatan, suplemen, dan lain-lain.”

Dalam keterangan terpisah, Direktur RSPP dr. Syamsul Bahri, MPH., menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi FIFGROUP, Djarum Foundation dan Dewan Pers di dalam upaya memotong rantai penyebaran COVID-19 di kalangan pekerja media, “Pada kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, upaya pencegahan penularan virus melalui *screening* terhadap orang-orang yang mempunyai risiko tinggi tertular COVID-19 seperti pekerja media menjadi sangat penting.”



PEKERJA MEDIA MENUNGGU
GILIRAN TES USAP POLYMERASE
CHAIN REACTION (PCR).

“Pada kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, upaya pencegahan penularan virus melalui screening terhadap orang-orang yang mempunyai risiko tinggi tertular COVID-19 seperti pekerja media menjadi sangat penting.”

Lebih lanjut Syamsul menjelaskan peran RSPP di dalam kegiatan PCR test yang dilakukan oleh Dewan Pers selama ini tidak terbatas pada pemberian layanan *screening* semata. “Bagi peserta test yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan memiliki gejala, kami dapat memberikan perawatan di RSPP Extension Modular. Fasilitas khusus untuk pasien COVID-19 yang beralamat di Simprug Jakarta Selatan ini berkapasitas 250 tempat tidur,” tutup Syamsul. ●

Narahubung:

1. Deritawati (Dewan Pers) 0812-8362-9553
2. Agus Widyandoko Susetyo (RSPP) 0812-9668-687
3. Yulian Warman (Chief of Corporate Communication and CSR FIFGROUP) 0815-1052-2237
4. Budi Darmawan (Corporate Communication Manager Djarum Foundation) 0818-878-815

DEWAN PERS DORONG PEMBERITAAN POSITIF PEREMPUAN DI ERA PANDEMI

Oleh: AGUNG DHARMAJAYA

Anggota Dewan Pers
Ketua Komisi Hukum dan Perundang-
undangan Dewan Pers



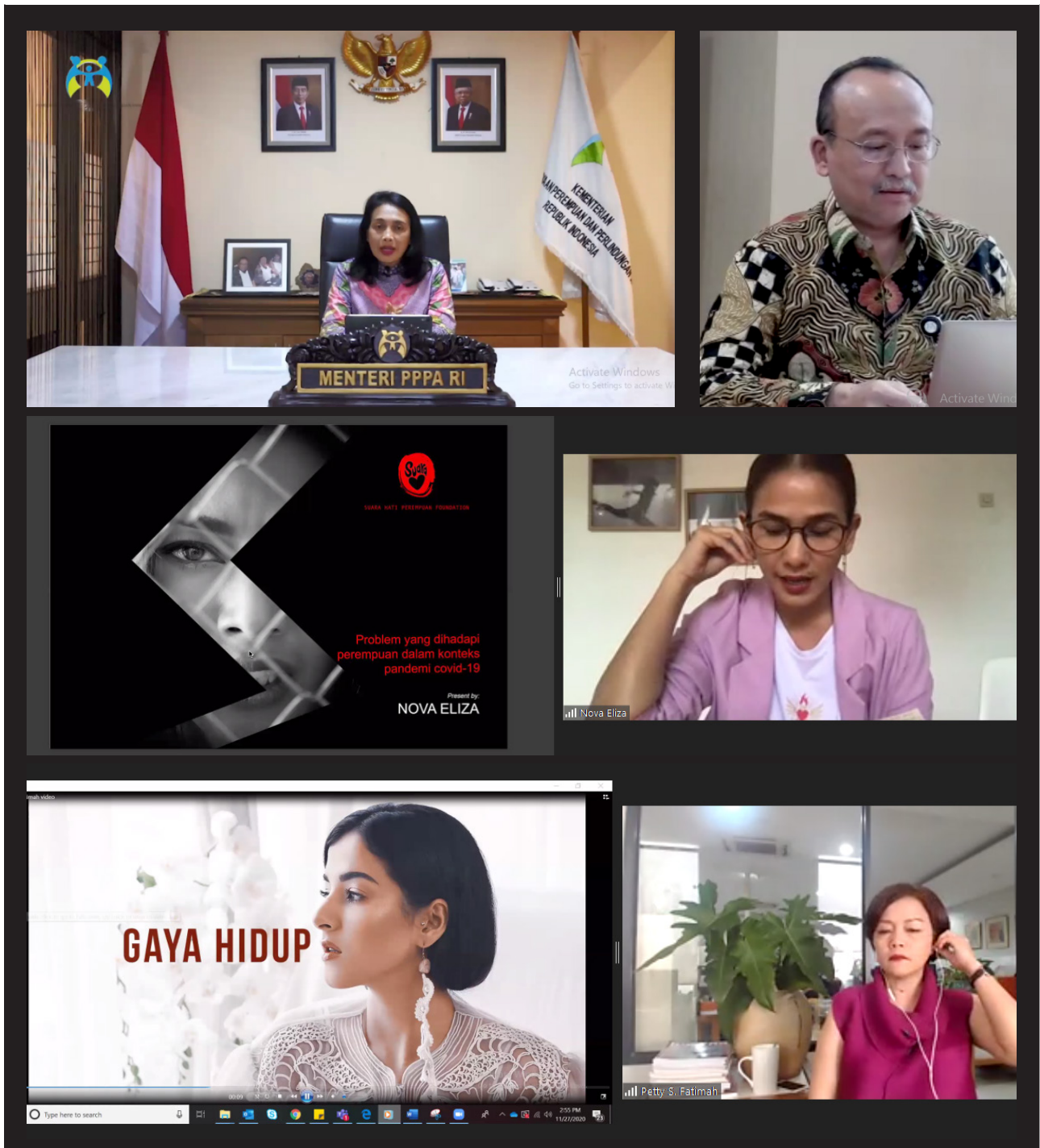
Dewan Pers terus mendorong media *mainstream* dan media online untuk terus memberitakan secara positif perempuan di era pandemi Covid-19 ini. Hal itu disebabkan perempuan memiliki peran besar dalam keluarga dan masyarakat baik dalam menjaga kesehatan maupun kehidupan ekonomi.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Agung Dharmajaya dalam webinar yang diselenggarakan atas kerjasama BBC Media Action dan Dewan Pers, 27 November 2020.

“Kita mendorong media memberitakan hal positif terkait dengan perempuan, segala aktivitas perempuan dalam kehidupan di rumah, berkeaktivitas, mengasuh anak dan segala macam kegiatan lainnya,” kata Agung.

Webinar dengan topik Pandemi Covid-19 & Perlindungan Terhadap Perempuan: Bagaimana Peran Pers? ini dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Dermawati.

Selanjutnya Agung menjelaskan bahwa, bagaimana media memberitakan yang sangat positif kepada

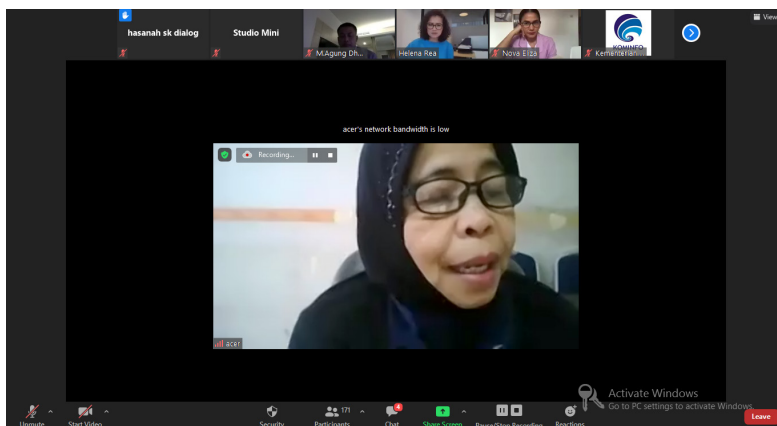
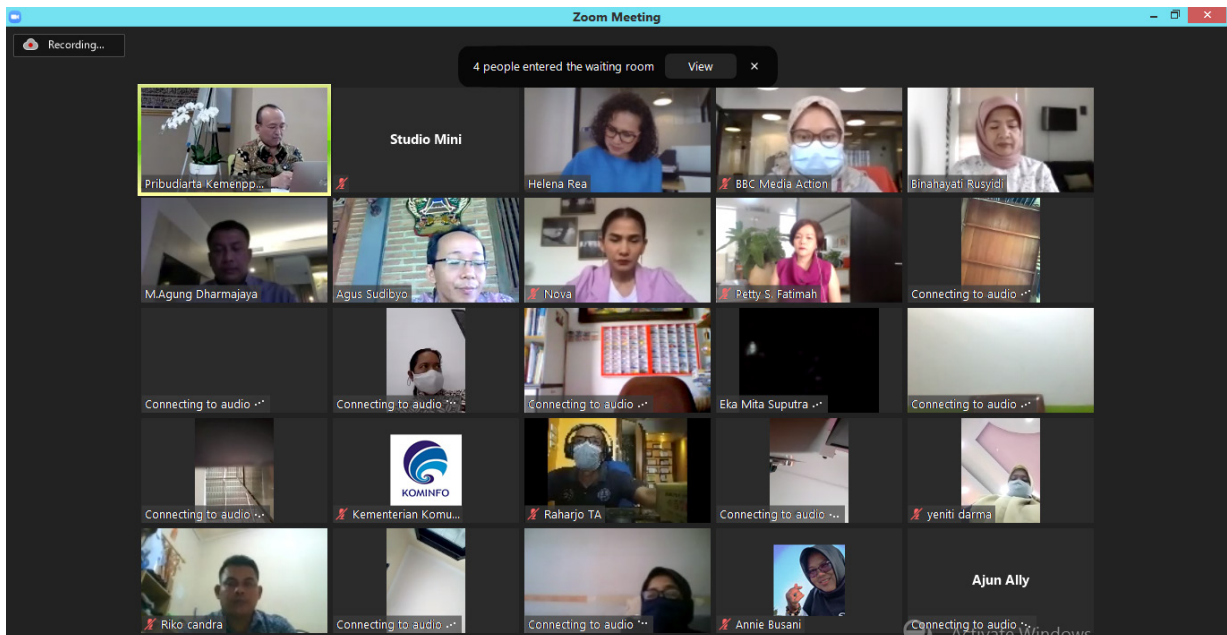


perempuan karena perannya yang banyak. Selama ini berita tentang perempuan agak terpinggirkan namun dalam situasi pandemi ini baru disadari pentingnya perempuan. Oleh sebab itu, hari ini menyaksikan banyak berita mengenai peran perempuan di era pandemi karena mendapatkan tempat dan mendapatkan perhatian publik, jelas Agung.



MENTERI PPPA DAN PARA NARA SUMBER WEBINAR BBC MEDIA ACTION "PANDEMI COVID-19 PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN, BAGAIMANA PERAN PERS?"

Menurut Agung, saat ini patut disyukuri bahwa media massa terus berkembang dalam pemberitaan terhadap perempuan baik dari sisi rubrik maupun ruang pemberitaan. "Ini semoga menjadi tren positif," katanya seraya menambahkan sebelumnya pemberitaan tentang perempuan di media massa terpinggirkan padahal *market* – nya besar.



Selain adanya tren pemberitaan positif mengenai perempuan seperti dijelaskan dalam beberapa contoh pemberitaan, Agung juga mencatat adanya perhatian media terhadap kekerasan yang dialami perempuan selama pan-



WEBINAR BBC MEDIA ACTION "PANDEMI COVID-19 PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN, BAGAIMANA PERAN PERS?", JUM'AT (27/11).

demis ini. Dari berbagai laporan ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan selama pandemi ini.

Catatan lain mengenai pemberitaan media massa saat ini, Agung menilai patut disyukuri bahwa di era pandemi, orang percaya kembali kepada media mainstream maupun media online. Hal itu disebabkan media sosial tidak selalu dapat dipercaya informasinya karena sumber berita sering tidak jelas.

Agung juga mengatakan bahwa media mempunyai peran tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga memberikan edukasi. Pada awal pandemi, media banyak memberitakan hal-hal yang malah menimbulkan ketakutan seperti jumlah korban dari pandemi Covid-19. Namun belakangan media juga berperan memberitakan bagaimana terjadinya perubahan perilaku di dalam masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.

Dalam webinar kerjasama BBC Media Action dan Dewan Pers ini hadir pula pembicara lainnya yakni Pemimpin Redaksi Femina Petty S Fatimah, Aktris dan Aktivistis Perempuan Nova Eliza dan peneliti Universitas Padjadjaran Binahayati Rusydi. Diskusi ini dipandu Helena E Rea dari BBC Media Action. ●